

## **KONTEKSTUALISASI PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT JALAN TENGAH DALAM MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL**

Agus Sutono<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Semarang  
agussutono@upgris.ac.id

### ***Abstract***

Threats, challenges, obstacles and disturbances (ATHG) of national resilience in the situation to this day continue to experience dynamics. ATHG, both from inside and outside, demands extraordinary efforts based on a substantive study of the basic values of Pancasila. Pancasila values as a middle way philosophy that have been successfully developed provide a strong contextualization of efforts to strengthen current national resilience. These values, among others, are the values of virtue, namely the value of openness; the value of responsibility; the value of solidarity; trust value; the value of justice; and the value of cooperation. These values have important relevance for the Indonesian nation, especially in strengthening national resilience which is based on strengthening the human identity of the Indonesian nation.

**Keywords:** Pancasila, middle way philosophy, national resilience

### **Abstrak**

Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) ketahanan nasional dalam situasi sampai hari ini terus mengalami dinamika. ATHG baik yang bersumber dari dalam dan luar menuntut upaya luar biasa dengan berlandaskan pada kajian substantif tentang nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat jalan tengah yang berhasil dikembangkan memberikan kontekstualisasi yang kuat terhadap upaya memperkokoh ketahanan nasional saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain, nilai-nilai keutamaan yaitu nilai keterbukaan; nilai tanggung jawab; nilai solidaritas; nilai kepercayaan; nilai keadilan; dan nilai kerjasama. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi penting bagi bangsa Indonesia utamanya dalam memperkuat ketahanan nasional yang berlandaskan pada penguatan jati diri kemanusiaan bangsa Indonesia.

**Kata kunci:** Pancasila, filsafat jalan tengah, ketahanan nasional

Ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa besar dan berat. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG menjadi kosa kata utama dan diskursus dan upaya-upaya penguatan ketahanan nasional ATHG yang dihadapi Indonesia saat ini terus berubah secara dinamis baik yang beraal dari dalam maupun luar negeri. ATHG dewasa ini saling tumpang tindih dan berkelindan antar bidang, baik sosial, budaya, ekonomi maupun ideologi. Dalam kasus terakhir, pandemi Covid19 juga dapat sebagai trigger atau pendorong masalah-masalah ketahanan nasional apabila tidak tertangani secara baik.

Penelitian ini hendak mengkaji aspek lain dari ATHG ketahanan nasional dalam persepektif yang lebih mendasar melalui pengkajian Pancasila sebagai filsafat jalan tengah dalam menghadirkan nilai-nilai dasar yang dapat dikontekstualisasikan dalam penguatan ketahanan nasional. Pancasila sebagai

filosof jalan tengah memiliki nilai strategis dan relevansi yang sangat tinggi jika dikaitkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan lebih jauh dalam konteks pembentukan ketahanan nasional. Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa dan negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya. Pancasila dengan kata lain menjadi salah satu bentuk tawaran ide yang bisa disandingkan dengan pemikiran-pemikiran individualisme dan sosialisme, jika menyangkut pembicaraan mengenai manusia. Pemahaman Pancasila sebagai filosof jalan tengah yang bersumber dari pemaknaan atas jati diri manusia Indonesia, menjadi jalan bagi upaya pemaknaan yang lebih jauh tentang bagaimana ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia seharusnya dibangun.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan obyek material Pancasila dengan obyek formal filosof. Sebagai sebuah penelitian bidang filosof maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hermeneutika dengan unsur-unsur metode sebagai berikut :

a. Deskripsi

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau uraian secara deskriptif mengenai konsep umum tentang Pancasila, dan konsep filosof jalan tengah

b. Verstehen (pemahaman )

Metode ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai serta makna termasuk di dalamnya sistem nilai dalam konteks kehidupan sekarang dari konsep atau pemikiran tentang Pancasila sebagai filosof jalan tengah, utamanya terkait dengan upaya pembentukan ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia.

c. Interpretasi

Metode ini dimaksudkan untuk mengungkapkan, menerangkan dan menerjemahkan objek material di mana metode ini merupakan suatu proses menunjuk arti, yaitu mengungkapkan , menuturkan dan mengatakan sesuatu yang merupakan esensi realitas (Kaelan, 2005 :76 ).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Paradigma Individualisme***

Semua ideologi selalu bertitik tolak sekaligus bermuara pada pemikiran tentang kejadiannya manusia. Individualisme lebih menekankan peran individu dalam konteks masyarakatnya, sedangkan sosialisme lebih menekankan sisi sosialitas yang harus dibangun dalam konstruksi kehidupan ini. Lebih lanjut Veecer juga memberikan penjelasan bagaimana individu menjadi dasar pengandaian dalam relasi-relasi otonomnya, sebagai berikut:

“Individualisme ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Jean Jacque Rousseau (1712-1778) yang mendefinisikan masyarakat sebagai “kontrak sosial” yang diadakan antara pihak-pihak otonom. Tidak ada kaitan sosial batiniah yang dari dalam diri manusia mempersatukan mereka menjadi masyarakat. Tidak ada sosialitas berdasarkan relasi-relasi batiniah yang menjadikan individu makhluk sosial.

Individu bukan sel, sebab istilah ini mengandaikan adanya suatu antar hubungan dari dalam atau suatu posisi fungsional di dalam keseluruhan. Individu adalah atom atau molekul, yang sudah lengkap dalam dirinya, berkemauan sendiri dan mampu menggabungkan diri sesukanya dengan atom-atom lain. Individualitas merupakan sumsum masyarakat (Veecer, 1985:67)”.

Individualisme juga menyatakan bahwa masyarakat tidak berevolusi atau tidak maju. Hal ini dikarenakan hanya ada individu-individu yang mengadakan relasi-relasi lahiriah, dan mereka sendiri tidak berubah, maka masyarakat pun tidak berubah. Sejarah selalu berulang. Revolusi-revolusi dalam masyarakat (misalnya politik maupun budaya) hanya menghasilkan pergeseran saja. Selalu sudah ada dan selalu akan ada konfrontasi dan aduan kekuatan antara pusat-pusat individual, konfrontasi mana disusul suatu keseimbangan baru, yang pada pokoknya tidak berbeda dari keseimbangan lama. Pandangan inilah yang disebut *the seesaw theory of history*, artinya masyarakat adalah seperti ungkit-ungkit (*seesaw*), yang selalu mencari keseimbangan antara kedua ujungnya. Hanya keseimbangan yang selalu dicari, bukan perubahan (Veecer, 1985:67).

Masyarakat dibayangkan seperti sebuah mekanisme atau sistem dalam pandangan individualistis. Mesin terdiri dari banyak suku cadang yang dari diri sendiri tidak pernah mampu membentuk suatu kesatuan. Suku cadang dipasang dan disambung satu sama lain dari luar; hubungan antar mereka tetap bersifat lahiriah saja, sewaktu-waktu mereka akan dapat dibongkar dengan rekayasa teknik tertentu. Konsep ini dalam filsafat sosial dan sosiologi memberikan cara pandang untuk melihat ke belakang dalam usahanya mencari sebab-sebab semua gejala sosial.

Pandangan mekanistik sebagai turunan individualisme ini banyak berakar pada pandangan filsafat Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Henry Charles Carey (1793-1879). Thomas Hobbes dalam bukunya *Leviathan* (1651) menyatakan bahwa pengalaman empiris merupakan satu-satunya sumber pengetahuan ilmiah yang sah. Masyarakat adalah himpunan individu-individu, yang secara egoistis mengejar kepentingan mereka sendiri sehingga akibatnya adalah adanya situasi perang semua lawan semua, keadaan *homo homini lupus*, dan rasa takut. Ikatan-ikatan sosial adalah bentuk-bentuk *cease fire* saja. Rasa takut mendorong orang untuk mengusahakan suatu keseimbangan antara mereka. Keseimbangan kalau berhasil, dan semua pihak antagonis menjadi sama kuat, akan muncul suatu koeksistensi yang berdasar pada kekuatan dan ketakutan.

Keseimbangan yang demikian ini sebenarnya juga tidak dapat diandalkan karena mudah goyah dan penuh bahaya. *Equilibrium* sosial ini sewaktu-waktu dapat hancur. Untuk mencapai *equilibrium* sosial yang lebih abadi dan kokoh, maka muncul kesepakatan untuk mengganti koeksistensi tersebut dengan hidup bermasyarakat, dimana kekuatan fisik diganti dengan kekuatan hukum. Orang rela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada kekuasaan negara, supaya menerima perlindungan hukum yang lebih pasti demi perkembangan kehidupan mereka. Hal ini senada dengan apa yang dipikirkan dan dinyatakan oleh John Locke. Locke menyatakan bahwa individu bersedia untuk mengikat diri kepada hidup bernegara, supaya tercapai suatu keadaan yang memungkinkan tak seorang pun lebih kuat daripada yang lain. Semua orang sama di hadapan hukum (Veecer, 1985:69).

*Principles of Social Science* menjadi tesis dari Henry Charles Carey dalam menyusun tesis dalam memandang masyarakat yang mekanistik. Manusia disebut molekul masyarakat. Masyarakat dijadikan satu bukan karena adanya suatu naluri sosial di dalam diri manusia, melainkan karena pengaruh daya penarik antara anasir-anasir positif dan negatif. Setiap unit menarik dan ditarik sekaligus sehingga terjadilah hukum gaya berat sosial yang berbunyi, semakin banyak orang berkumpul di suatu tempat, semakin besar daya penariknya. Hukum ini dibuktikan dengan menunjuk pada kota-kota besar yang menarik arus urbanisasi. Pembangunan masyarakat tidak disebabkan oleh usaha dan partisipasi bebas orang, melainkan merupakan akibat keadaan dan kejadian tertentu (Veecer, 1985:69).

Tesis-tesis individualitas di atas memberikan pemahaman pada satu sisi bagaimana individu menjadi faktor utama dalam masyarakat. Tesis tersebut sekaligus menegaskan bahwa individualitas adalah kondisi objektif yang terjadi. Sosialitas manusia sebenarnya tidak atau bukan kodrat dalam diri manusia.

Konsep individualitas dalam konteks yang lebih jauh ini tampak dan tercermin pada pandangan-pandangan liberalisme yang menekankan pada prinsip kebebasan sebagai hal yang utama dari keberadaan manusia. Ideologi liberalisme dewasa ini sebagai cerminan dari individualisme ini menjadi ideologi yang banyak menarik pengikut. Ideologi ini namun juga membawa konsekuensi lanjutan yang tidak sedikit karena ide kebebasan yang tidak terkendali juga memunculkan masalah baru dalam banyak aspek dan bidang.

### ***Paradigma Sosialisme***

Kutub diametral berikutnya adalah ideologi yang mendasarkan diri pada ide dasar sosialisme atau kolektivisme. Ide sosialisme atau kolektivisme menghadirkan posisi sosialitas diri manusia sebagai hal yang utama. Sisi sosialitas manusia ini diwakili dalam wujud masyarakat. Sisi sosialitas yang berwujud dalam konsep masyarakat dihadapkan dengan individu. Tesis yang diajukan bahwa hanya melalui masyarakat sebagai kenyataan objektif manusia maka kestabilan, kemakmuran hanya dapat diperoleh oleh individu, dan hanya jika individu-individu anggota masyarakat menyadari sifat tak terelakkan dari hukum masyarakat, dapat menyesuaikan diri, dan berpartisipasi penuh di dalamnya. Sisi sosialitas manusia yang sebenarnya membawa kebaikan dan kenyamanan hidup pada manusia.

Pandangan-pandangan sosialisme manusia ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran August Comte (1798-1857) dan Herbert Spencer (1820-1903). August Comte menjadi peletak dasar sosialisme modern dengan ide positivisme logisnya. August Comte banyak mendasarkan diri pada teori Aristoteles khususnya tentang masyarakat yang harus dilihat sebagai orde, yaitu suatu susunan yang tetap dan tertib. Orde dilatar belakangi oleh kenyataan, bahwa orang saling membutuhkan dan saling melengkapi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tiap-tiap orang dan tiap golongan mempunyai tugas dan kewajiban sendiri. Masyarakat disusun berdasarkan prinsip pembagian tugas. Sehingga orde adalah keadaan normal yang bertumpu pada sifat sosial manusia, yang disebut *zoon politicon*. Oleh August Comte, susunan masyarakat ini tidak dapat ditafsirkan seolah-olah tidak pernah terjadi perubahan dan perkembangan. Masyarakat bersifat dinamis juga. Hal ini karena manusia berada di bawah hukum evolusi. Orde selalu didampingi oleh kemajuan. Orde dan kemajuan bersaudara kembar, sebab merupakan dua segi dari realitas sosial (Veecer, 1985:19)".

Pandangan utama Comte mengenai sosialitas manusia sebagai dasar dari kehidupan bermasyarakat dalam etika sosial yang ditawarkan. Menurut Comte, etika sosial adalah satu-satunya sarana yang paling baik untuk memecahkan semua masalah yang timbul dalam rangka proses industrialisasi. Etika sosial dalam perjalanan sejarahnya tidak hanya mengembangkan pengetahuannya mengenai hal-hal yang ada, tetapi juga mengenai hal-hal yang seharusnya ada. Manusia dalam diri manusia bersarang dua kecenderungan, yaitu egoisme dan altruisme. Kecenderungan sisi egoisme makin melemah secara bertahap, sedangkan yang kedua menjadi semakin menguat, sehingga pada akhirnya sosialitas manusia menang dan berkuasa. Manusia makin menyadari pertaliannya dengan orang lain

Comte berpendapat bahwa dapat ditarik sebuah pokok pikiran sejarah dunia menurutnya adalah proses evolusi akal-budi, yang dalam perkembangannya dikuasai oleh hukum yang satu dan sama bagi seluruh dunia. Umat manusia dipandang sebagai satu badan hidup yang tak mati. Individu-individu adalah bagian-bagian organisme itu, yang hidup demi kepentingan keseluruhan. Inilah holisme dan kolektivisme.

Pemikiran kedua yang mendasari pemikiran sosialisme (holisme dan kolektivisme) adalah Herbert Spencer. Teori Spencer mengenai evolusi masyarakat merupakan bagian dari teorinya yang lebih umum mengenai evolusi alam. Spencer dalam bukunya *Social Statistic*, masyarakat disamakan dengan suatu organisme. Ciri-ciri yang dikenakan pada organisme hidup dapat dikenakan juga pada badan masyarakat.

Organisme sosial Spencer berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas. Spencer memahami dan memakai kata organisme sosial secara positivistik dan deterministik (Veecer, 1985:39). Masyarakat adalah organisme. Semua gejala sosial diterangkan berdasarkan suatu penentuan oleh hukum alam. Hukum yang memerintah atas proses pertumbuhan fisik badan manusia, memerintah juga atas proses evolusi sosial. Manusia tidak bebas dalam hal ini. Manusia tidak dapat memainkan suatu peranan bebas dalam mengembangkan masyarakat. Konsep inilah yang membedakan dengan Aristoteles, sebab Aristoteles mengajarkan suatu organisme normatif. Yaitu bahwa masyarakat diumpamakan dengan organisme, sebab para anggotanya berkewajiban untuk membangun masyarakat menjadi satu. Masyarakat dapat menjadi badan yang berintegrasi, asal anggotanya menyadari tanggung jawab sosialnya dan menyesuaikan perilakunya dalam norma itu.

Spencer menyatakan bahwa masyarakat adalah organisme, yang berdiri sendiri dan berevolusi sendiri lepas dari kemauan dan tanggung jawab anggotanya, dan dibawah kuasa suatu hukum. Individualisme (individualistis, atomistis, dan mekanistis) atas dasar pemikiran yang demikianlah maka menjadi berseberangan secara diametral dengan sosialisme (kolektivisme, holistik, dan organistik). Pancasila dalam posisi diametral inilah sebagai ideologi jalan tengah berada di antaranya. Pancasila melihat problem ini dalam sudut pandang yang tidak diametral.

### ***Paradigma Pancasila***

Pancasila dalam latar diametral antara paradigma individualisme dan sosialisme dapat dikatakan bahwa terdapat dua gambaran utama yaitu gambaran manusia individual dan gambaran manusia sosial. Perbedaan tersebut dapat dipetakan antara lain bahwa gambaran manusia sosial berangkat dari teori konflik. Gambaran manusia yang diturunkan dari pemikiran August Comte, Herbert Spencer dan Marx lebih banyak bercorak kolektivis, holistis, dan organistis, sedangkan manusia yang tampil dalam teori konflik lebih banyak bercorak individualis sebagaimana tercermin dari pemikiran John Locke, maupun Thomas Hobbes.

Marxisme sebagai cerminan sosialisme lebih berdekatan dengan Realisme, sedangkan teori konflik lebih dekat dengan Nominalisme. Teori konflik melihat manusia sejauh manusia dirangsang oleh kepentingannya yang ada kaitannya dengan posisinya dalam kerangka superordinasi-subordinasi. Sedangkan fungsionalisme lebih mendasarkan pada fungsionalitas manusia dalam sistem hidup yang disebut masyarakat.

Pancasila melihat bahwa tidak pada tempatnya untuk memisahkan perilaku sosial dari inti kepribadian manusia, yaitu kesadahan dan kebebasan. Manusia yang tidak diasingkan dari diri sendiri, merasa diri bebas dan berkuasa atas hidupnya sendiri. Kesadaran sebagai individu berkaitan erat dengan kebebasan eksistensial. Manusia demikian juga apabila bertindak sama seperti banyak orang lain, manusia menyadari kemungkinan untuk bertindak tidak sama. Bertindak sama atau tidak itu diputuskan sendiri olehnya sewaktu-waktu dapat diputuskan sendiri.

Pancasila dalam melihat aspek individualitas dan sosialitas manusia terlihat mengakomodasikan dua sisi ini dalam satu sudut pandang baru, yaitu bahwa individualitas dan sosialitas tidak mungkin untuk saling ditiadakan, namun justru di dalam pertemuan antara individualitas dan sosialitas inilah manusia mendapatkan kepenuhannya.

Kesadaran menjadi titik penting untuk menentukan dua sisi, individualitas dan sosialitas ini. Jika Gabriel Marcel memakai istilah partisipasi dalam arti yang berganda, yaitu 'diikutsertakan' (pasif), dan 'ikut serta' (aktif); dan Merleu Ponty memakai istilah *presence* (kehadiran), sebagai suatu bentuk kesertaan aktif dimana manusia dan dunia menghadirkan diri satu kepada yang lain sebagai timbal balik; sedangkan fenomenologi menggunakan istilah 'intensionalitas' yaitu pengarahannya diri secara dinamis atas dasar kebebasan manusia, maka Pancasila lebih dari itu. Hakikat yang harus dipahami adalah bahwa individualitas dan sosialitas tidak menjadi benar keduanya apabila pemutlakan salah satunya yang ditonjolkan. Justru keseimbangan di antara keduanya itulah realitas yang sesungguhnya.

Pancasila adalah ideologi yang sangat relevan di antara tawaran-tawaran ideologi lainnya, utamanya dalam hal penyikapan terhadap konsep manusia. Problem yang muncul hanyalah kemudian, dapatkah Pancasila sebagai ideologi jalan tengah bisa lebih diterima secara lebih luas lagi. Hal ini perlu dinyatakan terkait dengan belum terlihatnya Pancasila sebagai filsafat atau ideologi jalan tengah di antara dikotomi ideologi berdasar individualisme dan sosialisme dengan ide-ide turunannya.

Ide-ide individualisme dan sosialisme dalam ranah ideologi yang bersifat praktis mudah dikenali, tetapi tidak mudah pada Pancasila untuk dikenali sebagai ide jalan tengah. Oleh karenanya persoalan penting dan strategis dari Pancasila untuk dapat secara mudah dikenali di antara dua dikotomi individualisme dan sosialisme.

Secara strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memunculkan ide-ide turunan yang berhulu pada ide jalan tengah Pancasila. Jika individualisme mudah dikenali dengan ide turunan lainnya misalnya liberalisme dan kapitalisme, serta jika sosialisme mudah dikenali dengan ide turunan lainnya misalnya kolektivisme dan sosialisme dalam bidang ekonomi maupun politik, maka Pancasila juga harus menemukan ide turunan tersebut. Ide turunan tersebut antara lain adalah gotong royong. Ide-ide turunan ini harus sedemikian rupa menjadi ciri pengenal dari Pancasila. Hanya melalui ide-ide turunan inilah Pancasila mendapatkan tempat dalam persinggungan ideologi-ideologi besar lainnya.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 1 Juni 1945:

“negara Indonesia, yang kita dirikan haruslah negara Gotong Royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis daripada kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Marilah kita menyelesaikan karyo-gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, amal semua buat kepentingan bersama, keringat semua buat kebahagiaan semua. Itulah gotong-royong. Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realitas, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalitas, yang merdeka, yang penuh perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan *sociale-rechtvaardigheid*, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, - janganlah lupa syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila”.

Gotong royong menjadi kekhasan ide turunan dari Pancasila yang secara mudah akan lebih membantu untuk menderivasikan Pancasila dalam satu bidang yang lebih aplikatif. Turunan ide-ide lainnya juga menjadi penting untuk semakin menempatkan Pancasila dalam pertemuan dengan pemikiran-pemikiran ideologi lainnya.

Sosialisme dan individualisme telah menimbulkan ketegangan dalam aspek pragmatismenya ketika keduanya bertemu dalam arus besar ide turunannya, yaitu sosialisme sebagai ideologi dan liberalisme kapitalisme sebagai ideologi pula. Kecenderungan yang nampak dari sosialisme adalah kecenderungan kepada sistem otoritarianisme yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia. Kecenderungan yang kedua adalah timbulnya proses dehumanisasi karena prinsip tujuan menghalalkan cara.

Pada ideologi liberalisme dan kapitalisme juga memunculkan sekurang-kurangnya empat kecenderungan. Kecenderungan yang pertama adalah munculnya masyarakat teknokratis. Masyarakat yang demikian ini terdajah mekanisasi dan fragmentasi kehidupan masyarakat. Pemutlakan posisi

teknologi dan teknik dalam masyarakat menjadikan persepsi masyarakat terhadap realitas dipersempit menjadi satu matra saja. Oleh Herbert Marcuse keadaan ini disebut dengan suatu istilah *one dimensional Man*. Akibat lanjutannya adalah kecenderungan adanya depersonalisasi dan dehumanisasi. Manusia menjadi kehilangan matra hidup pribadinya. Manusia hanya menjadi sebuah sekrup dalam suatu mesin raksasa yang jalannya tidak tergantung sama sekali pada diri manusia melainkan tergantung kepada teknik. Hal ini juga tampak dari ketergantungan manusia salah satunya pada teknologi informasi. Manusia seolah-olah tidak dapat hidup tanpa teknologi komunikasi. Gilirannya, manusia justru menjadi sangat tergantung dengan teknologi informasi tersebut. Manusia kehilangan kebebasannya untuk menentukan kehidupannya sendiri, justru oleh karena teknologi yang semula menjadi sarana untuk mempermudah hidup manusia. Materialisme dan pragmatisme adalah buah dari liberalisme dan kapitalisme ini.

Kecenderungan kedua adalah terbentuknya ketergantungan dalam relasi antar negara. Relasi yang tidak adil karena hanya semata digerakkan oleh sebuah hukum yaitu hukum pasar. Ekonomi menjadi kekuatan utama dalam kehidupan yang sebenarnya justru mendorong manusia kepada krisis identitas yang akut. Kecenderungan yang ketiga adalah menguatnya sikap individualisme liberal yang sangat berorientasi pada kepentingan individual semata.

Pancasila sebagai salah satu bentuk ideologi yang berakar pada filsafat jalan tengah maka Pancasila juga harus menjadi orientasi dasar dalam kehidupan bernegara. Orientasi dasar Pancasila adalah wawasan ke depan yang integral dan integratif, mengakui dan mengembangkan kehidupan sosial-religius, memiliki orientasi pada manusia dan kemanusiaan. Semua orientasi tersebut berlandaskan pada norma dasar keseimbangan. Norma jalan tengah yang sangat penting untuk dipilih dan sekaligus telah menunjukkan kenyataan dari Pancasila itu sendiri.

Orientasi yang demikian ini maka ide keseimbangan mendorong terbentuknya sikap mandiri dalam berbagai antinomi kehidupan. Kesederhanaan dipandang sebagai kebajikan sehingga terhindar dari materialisme sebagai buah dari paham individualisme.

Orientasi keseimbangan ini juga mendorong suasana kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan. Keberadaan orang lain bukan dipandang sebagai musuh (*homo homini lupus*), melainkan sebagai sesama (*partner*)-hidup kebersamaan, ko-eksistensi. Pandangan ini menjadikan hidup personal dan hidup sosial dipandang sebagai hal yang sama penting. Pandangan ini juga menjadikan yang satu tidak dikebawahkan pada yang lain, melainkan yang satu punya hubungan timbal balik dengan yang lain, Usaha bersama dipandang sebagai sesuatu yang berharga dan berguna bagi pertumbuhan hidup personal. Salah satu perwujudan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas adalah gotong royong, dan ko-operasi.

Gotong-royong dan ko-operasi menjadi salah satu ide turunan yang dapat diwujudkan dalam sistem kehidupan riil bangsa Indonesia, baik sistem kehidupan sosial budaya, sistem kehidupan politik dan sistem keamanan dan keamanan, serta sistem kehidupan ekonomi. Orientasi dasar yang demikian ini juga dapat menjadi pembanding dengan krisis-krisis yang terjadi pada ideologi besar lainnya.

Pancasila melihat bahwa manusia harus menempatkan titik keseimbangan antara otonomi dirinya atau individualitasnya dengan sosialitasnya. Tidak menempatkan keduanya dalam dikotomi yang terpisah satu sama lain. Kedua kutub dikotomi antara individualitas dan sosialitas tidak ditempatkan dalam situasi yang berbeda satu sama lain namun keduanya harus dilihat dalam satu hubungan yang mempengaruhi. Individualitas dan sosialitas bukanlah realitas yang berdiri secara terpisah, melainkan dua sisi atau segi dari realitas yang satu dan sama. Individualitas dan sosialitas adalah satu kesatuan. Namun dalam posisi yang demikian keseimbangan di antara keduanya menjadi hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila.

Individualitas dan sosialitas merupakan realitas tunggal manusia. Kehidupan manusia dapat dipandang dari sisi individualitasnya maupun sosialitasnya namun bukan berarti memutlakan salah satu sisinya. Individu sebagai persona membutuhkan orang lain dalam rangka personalisasi dirinya. Manusia seimbang Pancasila sebagai wujud dari filsafat jalan tengah secara jelas juga memberikan pesan bahwa manusia memang terikat dengan yang lain, tetapi juga mengatasi hubungan dan ikatan, meskipun ia tetap berada dalam hubungan dan ikatan tersebut. Semakin manusia menuju keunikannya sebagai individu atau person, semakin berkembang juga kualitas sosialitasnya. Manusia seimbang menempatkan situasi ini untuk semakin memperkaya kejadiannya. Manusia melalui keseimbangan sisi individualitas dan sosialitasnya ini maka mampu turut membangun dirinya, orang lain, dan dunianya.

Pancasila menerima kebenaran dalam aspek individualitas manusia dan juga menerima kebenaran dalam aspek sosialitasnya sebagai sebuah jalan kompromi atau jalan tengah. Pancasila menerima kebenaran aspek individualitas dan sosialitas manusia sebagai sebuah kenyataan jalan tengah yang sesuai dengan tuntutan kodrat kemanusiaan. Pancasila akan tetapi menolak pemutlakan masing-masing aspek, entah itu aspek individualitas ataupun sosialitasnya. Konsisten dengan prinsip jalan tengah inilah yang mendudukan Pancasila sebagai prinsip yang dapat menerima kebenaran dua aspek yang berbeda secara diametral dalam sebuah norma keseimbangan. Pancasila mengakui kebenaran keduanya, namun tidak boleh saling memutlakan. Pemutlakan atas salah satu aspeknya akan membuat tidak adanya lagi kebenaran yang sesungguhnya.

Keseimbangan dalam kedua aspek individualitas dan sosialitasnya ini mampu mendinamisasi situasi disaat manusia harus aktif ketika manusia menciptakan sesuatu untuk mengembangkan diri dan orang lain. Pada sisi yang lain keseimbangan ini juga mampu mendinamisasi situasi di saat manusia harus bersikap pasif saat manusia sebagai individu di bentuk oleh pengaruh dari luar akibat kehadiran orang lain dalam hidupnya. Keseimbangan inilah yang mampu membuat manusia sebagai pencipta sekaligus ciptaan. Individualitas manusia menjadi tidak akan bermakna jika individu manusia tidak bersama yang lain, dan demikian juga bahwa sosialitas manusia tidak akan ada artinya jika tidak ada individu.

Manusia di dalam Pancasila juga dipandang sebagai entitas berkesadaran yang memiliki relasi vertikal dan horisontal. Relasi vertikal mencerminkan aspek religiusitasnya, sedangkan relasi horisontal

mencerminkan aspek humanitasnya. Aspek humanitas dilahirkan dari dua unsur sifat yang dimilikinya yaitu individualitas dan sosialitas. Hakikat manusia seimbang Pancasila yang menempatkan sisi individualitas dan sosialitas manusia dalam sebuah dinamika yang tidak saling memutlakan memunculkan nilai-nilai utama di dalamnya, yaitu:

### ***Kontektualisasi Nilai terhadap Ketahanan Nasional***

#### **1. Nilai Keterbukaan**

Keterbukaan menjadi syarat penting bagi manusia untuk dapat berkembang dalam seluruh dimensinya. Manusia harus mampu membuka diri terhadap kehadiran orang lain sebagai bentuk perwujudan sosialitasnya. Namun manusia juga dapat menjadi lebih berkembang justru dalam hubungan dan kehadiran orang lain dalam kehidupannya. Keterbukaan menjadi syarat utama dalam menciptakan hubungan interpersonal dan dialog yang bermutu dan bernilai. Melalui keterbukaan maka pengakuan terhadap keunikan setiap pribadi yang mencerminkan individualitasnya dapat semakin terlihat.

Keterbukaan ini memiliki dua sisi, yaitu keterbukaan yang bersifat aktif dan keterbukaan yang bersifat pasif. Keterbukaan pasif adalah bentuk keterbukaan saat individu manusia untuk bertindak dalam menegaskan eksistensinya kepada yang lain. Keterbukaan yang bersifat pasif adalah keterbukaan saat individu memberikan atau menyediakan dirinya untuk yang lain. Keterbukaan aktif adalah keterbukaan kepada, sedangkan keterbukaan pasif adalah keterbukaan bagi.

Terdapat dua situasi yang saling memperkaya dalam hubungan interpersonal dan dialog yang bermutu dan bermakna. Individu pada satu sisi membuka diri untuk mengungkapkan dirinya kepada yang lain, tentang segala hal yang dapat diungkapkan dan dibagi kepada yang lain. Individu pada sisi yang lain juga terbuka dengan membiarkan yang lain untuk mengungkapkan diri. Oleh karenanya sikap menerima dan mengakui serta mendengarkan merupakan inti dari sisi ini yang memungkinkan hubungan interpersonal semakin bernilai.

Nilai keterbukaan dalam konteks ini maka merupakan cerminan aktualitas manusia seimbang Pancasila. Nilai keterbukaan pada tataran yang lebih praksis aktualitasnya tampak pada sikap hidup masyarakat Indonesia yang mampu menerima perbedaan dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Keterbukaan menjadi syarat utama dalam menciptakan hubungan interpersonal dan dialog yang bermutu dan bernilai, sebagaimana seyogyanya individu dalam masyarakat yang dapat memahami orang lain dalam setiap perbedaan yang dimilikinya. Keterbukaan juga mendorong pengakuan terhadap keunikan setiap pribadi yang mencerminkan individualitasnya dapat semakin terlihat. Proyeksi yang lebih besar lagi dalam hal ini adalah bagaimana individu sebagai bagian utama dari masyarakat dapat mengakui perbedaan, menerima perbedaan sebagai bagian dari upaya untuk memanusiakan dirinya secara penuh.

Nilai keterbukaan dalam tataran yang lebih praktis dapat ditunjukkan dengan sikap egalitarian yang memandang pihak lain sebagai pihak yang dapat saling memperkaya, dan memperbaiki mutu

kehidupan. Perilaku empatik pemangku kewajiban atas persoalan-persoalan kemasyarakatan juga dapat menjadi contoh perilaku yang relevan untuk dikembangkan berdasarkan prinsip Pancasila sebagai jalan tengah ini. Perilaku empatik merupakan perwujudan pengakuan, penerimaan, maupun keterbukaan terhadap semua pihak lain dalam suasana kebatinan yang positif dan bermutu.

## **2. Nilai Tanggung Jawab**

Hakikat manusia seimbang Pancasila sebagai wujud dari filsafat jalan tengah juga memberikan landasan nilai tanggung jawab yang sangat penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Keseimbangan dalam diri manusia yang memberikan jalan tengah pada sisi sosialitas dan individualitasnya memunculkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tugas kemanusiaan karena dalam tanggung jawab terdapat dimensi internal dan dimensi eksternal.

Dimensi internal memberikan mencakup sikap dan tindakan diri manusia untuk bersedia memberikan dan juga kesediaan untuk menerima. Dimensi internal dan eksternal ini mencakup kemampuan diri individu untuk bersedia memberi merupakan bentuk penghayatan dan penerimaan diri terhadap orang lain. Memberi merupakan sebuah dimensi sosialitas yang sangat nyata.

Memberi menjadikan ruang dialog dan relasional antara diri dengan orang lain. Memberi juga menunjukkan makna dan ungkapan tanggung jawab sosial terhadap orang lain yang artinya diri sendiri tidak secara egois hanya memikirkan dan berpusat pada dirinya, namun memikirkan dan melibatkan orang lain dalam hidup. Tanggung jawab pada sisi lain merupakan salah satu bentuk hubungan etis sekaligus merupakan nilai moral yang baik.

Nilai tanggung jawab sebagai konsekuensi dari hakikat manusia seimbang ini dapat diwujudkan dalam ranah yang bersifat praksis. Tanggung jawab sosial memberikan pengandaian bahwa di dalam tanggung jawab terdapat pengakuan akan kehadiran sekaligus kebebasan setiap pribadi individu. Individu mengakui dan menjamin semua nilai-nilai kehidupan yang menjadi hak masing-masing yang berarti menempatkan orang lain dalam hubungan yang empatik. Hubungan empatik menegaskan sisi sosialitas maupun individualitas manusia.

Nilai tanggung jawab juga secara praktis dapat dikembangkan dalam kehidupan kongkrit keseharian dalam masyarakat melalui sikap mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan yang individual semata. Kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan hidup merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai tanggung jawab ini. Nilai tanggung jawab mengandaikan keberpihakan individu terhadap individu lain dalam konteks kehidupan bersama. Pemangku kebijakan secara normatif harus memahami bahwa tanggung jawab merupakan nilai dasar yang harus diwujudkan dalam banyak tindakan konkret dalam setiap kebijakan publik yang diambil.

## **3. Nilai Solidaritas**

Solidaritas merupakan nilai keutamaan yang muncul bersamaan dan seiring dengan nilai keutamaan tanggung jawab. Solidaritas adalah prinsip hidup yang paling dekat dengan pengalaman

hidup bersama. Solidaritas adalah bentuk lain dari sikap dan penerimaan diri individu terhadap individu yang lain. Solidaritas adalah cara memandang dan menerima orang lain dalam kebersamaan hidup yang saling menyatukan. Solidaritas memberikan ikatan individu satu dengan yang lainnya dalam konteks kehidupan bersama sebagai manusia.

Solidaritas merupakan kunci penting dalam relasi sosial. Solidaritas mencerminkan pengakuan dan penghargaan individu satu sama lain. Keunikan manusia sebagai pribadi mendapatkan tempat dalam solidaritas yang demikian.

Hakikat manusia seimbang Pancasila sebagai wujud dari filsafat jalan tengah yang memberikan cerminan akan nilai solidaritas ini. Hal ini karena nilai solidaritas muncul dari norma-norma ideal keseimbangan antara sisi individual dan sosial manusia. Nilai solidaritas adalah bentuk afirmasi dari eksistensi individualitas pada satu sisi dan juga afirmasi atas eksistensi sosialitas pada sisi yang lain. Solidaritas hanya muncul dalam situasi penghargaan eksistensi persona manusia dalam sebuah komunitas yang bersifat interpersonal. Nilai solidaritas tidak pernah mengukur dan bertumpu pada sisi individualitas atau sosialitas semata, namun berada diantaranya dalam sebuah titik keseimbangan. Nilai solidaritas mengakui individualitas secara seimbang dengan sosialitasnya, dan bahkan solidaritas dibangun atas dasar keseimbangan hubungan sisi individualitas dan sosialitas manusia.

Nilai solidaritas dapat dibangun dan diwujudkan secara konkrit melalui semangat penghargaan atas pandangan kesejajaran harkat dan martabat manusia. Kesejajaran sebagai makhluk yang juga bermasyarakat dalam kehidupan global. Nilai solidaritas juga harus dipahami dalam kerangka untuk membangun persaudaraan umat manusia.

Nilai solidaritas ini juga tercermin dalam cita-cita persaudaraan global. Bahwa kehidupan seseorang mempunyai dampak, langsung ataupun tidak langsung, kepada kehidupan manusia seluruh dunia. Masing-masing manusia harus ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan dunia dan sebaliknya. Semangat persaudaraan dengan seluruh manusia harus semakin diteguhkan, meskipun banyak terjadi perbedaan antara masing-masing manusia atau masing-masing negara (Hadi, 1994:114). Solidaritas semakin penting dalam dunia global, dimana satu persoalan yang terjadi dan menyangkut persoalan kemanusiaan menjadi persoalan bersama yang harus di atasi. Contoh dari persoalan ini misalnya kehidupan ekonomi modern yang bukan lagi merupakan kumpulan ekonomi makro negara tetapi sudah berubah menjadi ekonomi dunia. Pengaruh teknologi yang merambah keseluruh dunia memiliki efek negatif yang perlu untuk diatasi bersama. Persoalan lingkungan yang bukan saja monopoli satu negara tetapi merupakan masalah bersama yang harus diatasi bersama (Hadi, 1994:115).

Persoalan kontemporer saat ini, sebagaimana berkembangnya ideologi terorisme yang merupakan salah satu tantangan bagi ketahanan nasional, yang menafikkan perbedaan, bukan lagi menjadi masalah yang kecil tetapi membutuhkan solidaritas bersama untuk dipecahkan mengingat

intoleransi yang mengancam harkat dan martabat kemanusiaan secara nyata. Nilai solidaritas sebagai bagaian dari kebersamaan menjadi hal dasar yang sangat penting.

#### **4. Nilai Kepercayaan**

Francis Fukuyama dalam bukunya *The Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial* (2002:32) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan *social capital* atau modal sosial yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Kepercayaan yang terbangun dalam komunitas menciptakan kestabilan sosial yang bersifat jangka panjang. Kepercayaan tumbuh dalam relasi sosial yang baik. Relasi sosial yang baik dibangun atas dasar pemahaman keseimbangan sebagai norma yang hadir dalam diri individu yang dproyeksikan dalam hubungan sosialnya dengan individu-individu yang lain.

Kepercayaan adalah nilai keutamaan yang hadir dalam relasi keseimbangan sisi individualitas dan sosialitas manusia. Kepercayaan juga mengandaikan bahwa semua hal sudah mempertimbangkan titik keseimbangan dalam setiap aspek yang ada, apapun itu. Kepercayaan juga merupakan sebuah afirmasi pengakuan sosialitas manusia yang menonjol, sebagai bagian dari individualitas manusia. Kepercayaan adalah bentuk kongkret dari penerimaan diri manusia yang bersifat individual dengan berorientasi pada orang lain. Kepercayaan hanya bisa terwujud ketika individu melibatkan orang lain sebagai pihak yang berelasi dengan individu tersebut.

Nilai kepercayaan dalam ranah yang lebih kongkret dalam bentuk sikap memegang teguh komitmen, dan menghargai setiap amanah kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan merupakan bentuk pengakuan terhadap yang lain yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dikomitmenkan. Menjaga kepercayaan dan memegang teguh komitmen merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua orang, sebagaimana seharusnya dalam kehidupan bernegara wakil-wakil rakyat yang memegang teguh kepercayaan rakyat yang diperoleh melalui cara-cara demokratis pemilu. Kepercayaan yang diberikan harus diwujudkan dalam komitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama sebagai sebuah kemaslahatan publik, yang tidak terjebak pada kepentingan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Pemangku kewajiban dengan demikian harus menempatkan nilai kepercayaan sebagai bagian penting yang mendasari setiap kebijakan publik yang akan diambil. Bagi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakilnya juga harus mempercayakan kepercayaan yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan publik sebagaimana seharusnya yang diharapkan. Kepercayaan menjadi modal sosial yang sangat bernilai untuk membangun masyarakat yang bermartabat.

#### **5. Nilai Keadilan**

Nilai keadilan selain mengandaikan keterkaitan relasi individu dengan individu lainnya. Keterarahan terhadap orang lain inilah yang menjadi inti dari makna keadilan. Keadilan adalah

bentuk pengakuan kesederajatan setiap individu dengan individu yang lain. Dalam relasi sosial keadilan merupakan nilai penting dalam upaya membangun kehidupan sosial yang bermartabat.

Keadilan merupakan cerminan sikap seimbang. Karena hakikat adil adalah keseimbangan. Norma keseimbangan dalam hakikat manusia seimbang ini menjadi dasar dari nilai keadilan ini.

Nilai keadilan dalam hal ini mencakup pada semua bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu bidang pun yang akan dikecualikan, dan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Hardono Hadi (1994:138) menegaskan kalimat keadilan secara konkret sebagai hak dan kesempatan bagi semua untuk menikmati keadilan dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Status, kedudukan, golongan, keyakinan, suku atau ras tidak pernah bisa menjadi alasan cukup untuk tindakan diskriminatif. Perbedaan hanya diperlukan dalam rangka pemenuhan fungsi pelayanan.

Persamaan dan perbedaan yang dimiliki individu sebagai warga negaran warga bangsa harus diabdikan kepada kepentingan publik yang masing-masingnya dimampukan untuk berkembang secara maksimal. Persamaan dan perbedaan juga menyangkut tanggung jawab demi pelaksanaan dan perwujudan keadilan sosial secara lebih luas. Bahwa semua manusia memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, sebagai tanggung jawab dasar yang tidak dapat dihindari. Hal ini diwujudkan dalam upaya dan usaha masing-masing individu dalam mengupayakan kesejahteraan bagi kehidupan, baik dalam aspek individual maupun dalam rangka kesejahteraan sosial yang lebih luas. Tanggung jawab perwujudan nilai keadilan ini dapat dimulai dengan perwujudan tanggung jawab dalam lingkungan paling kecil, yaitu tanggung jawab dalam keluarga dan lingkungan terdekat, serta terus dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas oleh masing-masing individu, di manapun dan dalam posisi apapun.

Nilai keadilan dengan demikian berarti bahwa setiap individu mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Keadilan dalam pengertian kesamaan yang didasarkan pada kondratnya sebagai manusia yang tidak dapat dihilangkan. Masing-masing individu berhak untuk menentukan hidupnya sendiri dalam segala aspek kehidupannya yang berhak untuk memperkembangkan dirinya secara maksimal. Perbedaan dalam hal hak, kewajiban dan tanggung jawab bukanlah didasarkan pada perbedaan kodrat, keturunan, agama, suku, ras, golongan dan lain sebagainya tetapi berdasarkan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat.

## **6. Nilai Kerjasama**

Hakikat manusia seimbang Pancasila sebagai wujud dari filsafat jalan tengah juga memberikan sebuah nilai penting lain selain nilai utama keterbukaan, tanggung jawab, solidaritas, kepercayaan. Nilai keutamaan tersebut adalah kerja sama. Nilai keutamaan kerja sama merupakan komprehensifasi dari nilai keterbukaan, tanggung jawab, solidaritas, dan kepercayaan. Keutamaan nilai kerjasama bersifat sangat praktis. Kerja sama merupakan sebuah prinsip yang mengakomodasikan semua potensi dalam kerangka mencapai tujuan tertentu.

Nilai kerja sama inilah yang secara khas menjadi nilai khusus dari Pancasila yang diturunkan dari norma keseimbangan hakikat manusia seimbang Pancasila, yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan prinsip kebersamaan yang mengandaikan peran-peran individual dalam merealisasikan proyeksi-proyeksi sosialitas manusia.

Gotong royong menjadi ciri khas afirmasi peran individu dalam kehidupan sosialnya. Gotong royong menjadi satu bentuk kekhasan masyarakat yang mengakui adanya sifat individual dan sosial manusia. Gotong royong mengandaikan keterbatasan individu dalam merealisasikan proyek-proyek kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya dengan menerima individu-individu lain untuk bersama-sama terlibat dalam merealisasikan kepentingan lintas individual.

Nilai-nilai keutamaan yang bersumber dari hakikat manusia seimbang Pancasila memberikan penegasan bahwa manusia menjadi dirinya sendiri hanya karena kehadiran orang lain. Individu dibentuk oleh orang lain. Namun individu juga membentuk orang lain yang mencerminkan sosialitas dirinya. Manusia secara seimbang membangun dirinya dan sesamanya. Individu membentuk sesamanya secara aktif yang sekaligus hal ini merupakan cara individu membangun dirinya. Manusia memiliki sifat pasif saat ia dibentuk oleh sesamanya. Manusia memiliki sifat aktif saat ia membentuk sesamanya dan dunianya. Pertemuan sifat pasif dan aktif inilah yang kemudian membentuk sifat proaktif. Sifat proaktif ini menunjukkan dan mencerminkan prinsip jalan tengah karena mengakomodasikan prinsip-prinsip yang secara diametral saling menunjukkan sisi berlawanan.

Individualitas dan sosialitas merupakan dua sisi dalam diri manusia yang merupakan realitas tunggal namun bekerja dalam norma keseimbangan atau jalan tengah. Individualitas dan sosialitas adalah realitas keseharian manusia atau faktisitas yang tak terelakkan dalam diri manusia. Dalam mewujudkan dimensi individualitas dan sosialitasnya tersebut manusia dituntut untuk menghayati norma-norma keseimbangan dalam relasi dengan sesamanya. Internalisasi norma-norma keseimbangan merupakan bagian dari penghayatan eksistensi manusia sebagai makhluk individual sekaligus sosial, makhluk yang memiliki sisi individualitas sekaligus memiliki sisi sosialitas.

Nilai keutamaan dari hakikat manusia seimbang Pancasila mencakup nilai keterbukaan, tanggung jawab, solidaritas, keadilan, dan kerjasama. Keutamaan nilai tersebut menjadi nilai dasar dan pedoman hidup manusia Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia secara praktis.

## **KESIMPULAN**

Pancasila sebagai filsafat jalan tengah memiliki relevansi penting sebagai penguat ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional yang dibangun harus berlandaskan pada konsep dasar dan hakikat manusia seimbang khas Pancasila. Secara praksis konsep manusia seimbang khas Pancasila sebagai intisari dari pemaknaan Pancasila sebagai filsafat jalan tengah melahirkan nilai-nilai keutamaan yaitu nilai keterbukaan, nilai tanggung jawab; nilai solidaritas, nilai kepercayaan; nilai

keadilan, dan nilai kerjasama. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi penting bagi bangsa Indonesia utamanya dalam memperkuat ketahanan nasional yang berlandaskan pada penguatan jati diri kemanusiaan bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi Atau Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta
- , 2000, *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Berofsky, Bernard, 1971, *Determinism*, Princeton University Press, America
- Bleicher, Joseph., 1980, *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique*, London Routledge and Kegan Paul.
- Darmaputera, Eka, 1988, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Dibyasuharda, 1990, *Dimensi Metafisik Dalam Simbol, Ontologi Mengenai Akar Simbol, Disertasi*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta
- Dister., Nico Syukur, 1988, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Drijarkara, 1980, *Driyarkara tentang Negara dan Bangsa*, Kanisius, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1989, *Filsafat Manusia*, cetakan kedelapan, Kanisius, Yogyakarta.
- Ewing, AC., 1962, *The Fundamental Questions of Philosophy*, Collier Books, New York
- Fukuyama, Francis, 2002, *The Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, Penerbit Qalam, Yogyakarta
- Hadi, Hardono, 1996, *Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Kanisius, Yogyakarta
- , 1996, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kaelan, 1999, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta
- , 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta
- Latif, Yudi., 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Yogyakarta
- , 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Yogyakarta

- , tanpa tahun, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*
- Pasha, Musthafa Kamal, Lasiyo, Fahmi Muqodas, Mudjiyana, 2000, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Ricouer, Paul., 1985, *Hermeneutics and The Human Sciences*, ed. Dan terj John B. Thompson, Cambridge, Cmbridge University Press.
- Siswanto, Dwi., 2001, *Humanisme Eksistensial Jean Paul Sartre*, Philosophy Press, Yogyakarta
- Snijders, Adelbert., 2004, *Antropologi Filsafat, Manusia, Paradoks dan Seruan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila, Pidato 1 Juni, 1945* BPUPKI
- , 1963, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Djilid Pertama , Penerbit Dibawah Bendera Revolusi
- Soros, Goerge., 2002, *Krisis Kapitalisme Global ( Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya)* terjemahan *The Crisis of Global Kapitalism* oleh Dindin Solahudin, Penerbit Qalam, Yogyakarta
- Sutrisno, Slamet, 2005, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Titus, Smith, Nolan., 1983, *Living Issues In Philoshopy, Persoalan-Persoalan Filsafat* alih bahasa Soejono Soemargono , Bulan Bintang, Jakarta
- Veecer, KJ., 1985, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Gramedia, Jakarta.
- Jurnal Filsafat “Wisdom” Seri 24, Februari 1996 *Refleksi Metafisik Atas Pancasila* oleh Suhartoyo Harjosatoto, FFI UGM, Yogyakarta
- Jurnal Filsafat “Wisdom” Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2013 *Konsep Muhammad Hatta tentang Implemntasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila* oleh Sri Soeprapto, FFI UGM, Yogyakarta.